



RENCANA STRATEGIS

2020-2024

Revisi II

**Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan, Stasiun
Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu**

KATA PENGANTAR

Revisi ke dua Rencana Strategis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu (Revisi ke 2, RENSTRA SKIPM BENGKULU) 2020 – 2024 disusun dalam rangka menyesuaikan perkembangan kelembagaan. Dalam rangka menyelaraskan dengan perkembangan kelembagaan revisi Renstra ini juga dilaksanakan untuk disesuaikan dengan kebijakan penganggaran.

Penyusunannya Revisi ke 2, RENSTRA SKIPM BENGKULU 2020 – 2024 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan visi “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, dengan pilar misi “Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan”.

Revisi Ke 2, RENSTRA SKIPM BENGKULU 2020 – 2024 ini selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan pembangunan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tahun 2024.

Komitmen, konsistensi dan kerja keras jajaran SKIPM BENGKULU dan dukungan dari semua pihak baik instansi terkait ataupun pelaku usaha dalam pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan adalah penting dan strategis, yang pada akhirnya misi tugas dan tanggungjawab BPPMHKP dalam melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dari Mutu perikanan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat terlaksana sesuai yang diamanatkan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak atas masukan dan sumbangan pemikiran sehingga dokumen Revisi ke 2, RENSTRA SKIPM BENGKULU 2020 – 2024 ini dapat tersusun. Semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Bengkulu, 28 Februari 2024
Plt. Kepala,



Jonis Setiawan, S.Pi

SIGN HERE

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Keputusan Plt. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu Nomor : B.180/SKIPM.BKL/TU.210/II/2024 Tentang Rencana Strategis Stasiun KIPM Bengkulu Tahun 2020-2024 Revisi 2.....	v
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kondisi Umum	3
1.3 Potensi dan Permasalahan	3
BAB II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	
2.1. Visi, Misi dan Tujuan.....	5
2.2. Sasaran Strategis	6
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan	
3.1. Arah kebijakan dan Strategi Pembangunan KP yang Terkait dengan SKIPM Bengkulu	8
3.2. Arah kebijakan SKIPM Bengkulu	11
3.3. Kerangka Kelembagaan	13
BAB IV Indikator Kinerja dan Kerangka	
4.1. Indikator Kinerja Program SKIPM Bengkulu Tahun 2020-2024	14
4.2. Kerangka Pendanaan	15
BAB V Penutup	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis dan IKU SKIPM Bengkulu 2024	6
Tabel 2. Target dan Sasaran Strategis serta IKU SKIPM Bengkulu 2020-2024	14
Tabel 3. Kerangka Pendanaan Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2020-2024	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi SKIPM	15
-----------	---------------------------------	----



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BENGKULU**

JALAN RAYA PADANG KEMILING KM. 12,5 RT. 02 KELURAHAN PEKAN SABTU
KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
TELEPON (0736) 53017, EMAIL : skibengkulu@gmail.com/
bengkulu@bkpm.kkp.go.id LAMAN <https://kkp.go.id/bkpm/stasiunkipmbengkulu>

**KEPUTUSAN PLT KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BENGKULU
NOMOR: B.180/SKIPM.BKL//TU.210/II/2024**

**TENTANG RENCANA STRATEGIS STASIUN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BENGKULU
TAHUN 2020-2024 REVISI 2**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KARANTINA
IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 5/PERMEN- KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan, Dokumen Kesepakatan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) tentang Rencana Kerja (RENJA) 2020-2024 serta Optimalisasi pelaksanaan program Pengendalian mutu dan Keamanan hasil perikanan Tahun 2020-2024 perlu ditetapkan Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2024 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan pencapaian pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan melalui peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, dilakukan melalui metoda pendekatan *balanced scorecard* pada sasaran strategis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Stasiun Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu tentang Rencana Strategis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional - 4 - TAHUN 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);
 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 229);
 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PLT KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BENGKULU 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu 2020-2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan bagi setiap unit kerja dilingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu dalam penyusunan rencana kerja (Renja) dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan pembangunan Pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan sampai tahun 2024;

KETIGA : Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang telah dianggarkan dan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 mengacu kepada Keputusan Plt. Kepala Stasiun ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 28 Februari 2024

Plt. KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN BENGKULU,



JONIS SETIAWAN, S.Pi

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Selanjutnya terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden yang telah ditetapkan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Ke-lima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan *stakeholders* kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Di dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 - 2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi

perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati ikan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran BKIPM dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, kualitas dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional, dan kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan hama dan penyakit ikan karantina.

Sedangkan keterkaitan fungsi BKIPM dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mencapai sasaran peningkatan kinerja ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan perikanan, seperti tuna, cakalang, tongkol (TCT), rajungan, udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut, serta komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi lainnya, seperti ikan hias tropis Indonesia adalah bagaimana peran BKIPM mampu secara efektif melaksanakan pengawasan/pengendalian (*official control*) secara efektif. Hasil audit dan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit-unit pengolahan ikan, sertifikasi, ketertelusuran (*traceability*), dan tindakan karantina dapat membantu dan memfasilitasi layanan sertifikasi ekspor produk perikanan yang memenuhi standar maupun ketentuan regulasi internasional, seperti SPS dan *Codex Alimentarius.*, atau memenuhi ekuivalensi dalam inspeksi/tindakan karantina yang tertuang dalam MoU/MRA dengan negara mitra tujuan ekspor.

Sertifikasi yang diterbitkan BKIPM merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan bersifat *mandatory*, tidak hanya sebagai jaminan dan standar perdagangan internasional, tetapi juga merupakan indikator keberhasilan akses pasar di negara tujuan, dan berfungsi juga untuk membangun kepercayaan konsumen akan reputasi pangan produk perikanan Indonesia.

Dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan BKIPM sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimaknai sebagai kondisi yang berhubungan dengan bagaimana kekuatan BKIPM dapat menterjemahkan kapabilitasnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020 -2024 dan arahan-arahan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Disamping faktor internal, faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah bagaimana peran BKIPM dapat menyelaraskan diri terhadap

faktor dinamika perubahan kebijakan pemerintah dan perkembangan sistem perdagangan internasional, kerjasama bilateral, regional, multilateral, MoU/MRA, harmonisasi standar dan sinkronisasi regulasi, jaminan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup untuk menjadikan kebijakan standar dan regulasi nasional maupun internasional tidak menjadi penghalang dalam pencapaian kinerja BKIPM.

Oleh karena itu faktor internal dan eksternal, potensi dan tantangan yang dihadapi BKIPM merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Strategis SKIPM BENGKULU tahun 2020 – 2024.

1.2 KONDISI UMUM

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada perencanaan pembangunan jangka panjang 2005-2025 adalah untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam tahapan pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kinerja BKIPM menjadi institusi yang berperan dalam menjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penilaian kelayakan status kesehatan ikan/tindakan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang diperdagangkan baik yang akan diekspor, yang akan dilalulintaskan antar area di dalam negeri maupun impor. BKIPM merepresentasikan salah satu peran penting KKP yang bertanggung jawab dalam menjamin penyediaan pangan yang sehat dan bermutu. Keberadaan SKIPM BENGKULU juga untuk mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati ikan untuk keberlanjutan melalui upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN

POTENSI

Dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar terhadap tuntutan perlunya jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan serta sebagai laboratorium acuan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, SKIPM BENGKULU ke depan menghadapi banyak tantangan dan ancaman. Untuk itu dalam perencanaan pembangunan SKIPM BENGKULU diperlukan analisa lingkungan strategis internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan maupun analisa lingkungan

eksternal yang meliputi tantangan dan ancaman yang terkini. Adapun potensi dan faktor kunci keberhasilan pembangunan SKIPM BENGKULU adalah sebagai berikut:

- a. Dukungan SDM SKIPM BENGKULU yang kompeten dan profesional.
- b. Dukungan sarana dan prasarana yang mendukung pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai standar.
- c. Kelembagaan SKIPM BENGKULU yang tertata dengan optimal dan kuat.
- d. Peningkatan hubungan kerjasama baik di dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan, antar Kementerian, Regional maupun Internasional.
- e. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peranan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKIPM BENGKULU sebagai UPT pelayanan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan masih mengalami beberapa permasalahan:

1. Dengan meningkatnya beban kerja SKIPM BENGKULU dan melihat kondisi saat ini terutama di bidang pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan, SKIPM BENGKULU masih memerlukan tambahan sumberdaya manusia untuk mendukung kegiatan pengujian di laboratorium.
2. Sarana dan prasarana laboratorium masih harus dikembangkan yang diperuntukkan kegiatan pelatihan teknis sehingga tidak akan mengganggu kegiatan pengujian rutin.
3. Sosialisasi tentang keberadaan SKIPM BENGKULU masih belum maksimal menjangkau berbagai pihak terkait maupun masyarakat, sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif tentang tugas dan fungsi serta keberadaan SKIPM BENGKULU.
4. SKIPM BENGKULU masih kurang dalam kerjasama laboratorium di tingkat regional dan internasional.

BAB. II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi, Misi dan Tujuan SKIPM BENGKULU

Visi SKIPM BENGKULU ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”**

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. SKIPM BENGKULU bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standarisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing

- dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative, serta
 4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di SKIPM BENGKULU.

2.2 Sasaran SKIPM BENGKULU

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis (SS) dan kondisi *outcome/impact* yang diinginkan dapat dicapai SKIPM BENGKULU dari program yang dilaksanakan, maka SKIPM BENGKULU telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKIPM BENGKULU TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR GET 2024
1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah Sertifikat CPIB Suplier yang Diterbitkan (Sertifikat)	Sertifikat	3
		2	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Dosmetik (Lokasi)	Lokasi	1
		3	Ruang Lingkup Produk yang Dijamin Melalui Sertifikat Sistem HACCP	Produk	1
		4	UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	UPI	4
2	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif	5	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di UPT BPPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	84
		6	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance Sesuai Standar Sistem dan Regulasi Lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (Lokasi)	Lokasi	2

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR GET 2024
3	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (Indeks)	Nilai	86
		8	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu	Nilai	82
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (%)	%	100
		10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (%)	%	80
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (Nilai))	Nilai	93,76
		12	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	82
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu (%)	%	80
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)	%	80
		15	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Meraih predikat WBK Lingkup BPPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	75

BAB. III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Yang Terkait Dengan SKIPM BENGKULU

Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, dan dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda RPJMN 2020 - 2024.

Salah satu agenda pembangunan yang berkaitan erat pada level tugas dan fungsi SKIPM BENGKULU adalah agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. Kegiatan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan antar area di dalam negeri;
2. Pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan/UMKM/usaha mikro/koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan; meningkatkan

fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (*official control*). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. Kegiatatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
2. Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
3. Kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan;
4. Menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan prasarana;
5. Meningkatkan standardisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium pengujian dan labaratorium acuan;
6. Meningkatkan standardisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium penguji;
7. Meningkatkan kualitas kegiatan penanganan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan;
8. Menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar(*compliance*);
9. Menambah kegiatan sosialisasi, bimbingan teksnis terkait pengendalian mutu hasil perikanan;
10. Berperan aktif dalam jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia;
11. Menambah kegiatan Inspeksi CPIB *Supplier* berupa Sertifikat hasil inspeksi CPIB di Unit Penanganan Ikan untuk memenuhi persyaratan standar yang berlaku sehingga keamanan hasil perikanan terjaga;
12. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
13. Menambahkan kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik.

Disamping 2 (dua) agenda pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan SKIPM BENGKULU adalah dalam rangka mencapai sasaran penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif. Pembangunan dengan arah kebijakan

tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan karantina dan perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. Kegiatan pengawasan lalu lintas ikan ekspor, dan antar area di dalam negeri di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran
2. Kegiatan pengawasan keamanan hayati ikan.
3. Kegiatan pengawasan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa BKIPM
4. Kegiatan tindak lanjut temuan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Keamanan hasil perikanan.
5. Kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan,
6. Optimalisasi PNBK-BKIPM.

Selanjutnya arah dan kebijakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategi penguatan tatakelola pemerintahan yang baik di KKP. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi peningkatan reformasi birokrasi BKIPM.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. Meningkatkan profesionalisme ASN;
2. Meningkatkan sistem pengawasan internal SKIPM BENGKULU (SPIP-BKIPM);
3. Meningkatkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA);
4. Meningkatkan kualitas laporan Keuangan SKIPM Bengkulu,
5. Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja BKIPM (SAKIP BKIPM).
6. Tingkat Kepatuhan penggunaan barang/jasa
7. Tingkat Kepatuhan Badan Milik Negara (BMN)

Dalam kaitan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada BKIPM dalam rangka mendukung perbaikan komunikasi, perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan pendapatan pelaku utama dan *stakeholders* kelautan dan perikanan. Arahan tersebut dilaksanakan dengan strategi meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan *stakeholders*- SKIPM BENGKULU. Implementasi dilaksanakan melalui kegiatan prioritas membangun forum komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha, pengguna jasa dan instansi terkait, dan sinergi dalam penyelenggaraan bulan mutu ikan dengan tujuan

membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

3.2 Arah Kebijakan SKIPM BENGKULU

Dalam rangka menjalankan kebijakan pembangunan perikanan yang sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan 5 tahun kedepan serta Selaras arah kebijakan pembangunan SKIPM tahun 2020-2024 maka strategi yang dibentuk yang ditempuh Bengkulu tahun 2020-2024 terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya menjalankan kebijakan pembangunan perikanan tersebut yaitu:

1. Peningkatan akuntabilitas dan akseptabilitas hasil pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
2. Pengembangan dan penyempurnaan teknik dan metode pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
3. Pengembangan sistem informasi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
4. Pengembangan penataan SDM; dan
5. Penerapan online sistem pelayanan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dalam menentukan akses pasar produksi perikanan baik pasar internasional maupun domestik. Dengan demikian tindakan karantina ikan disamping dapat menjaga kelestarian sumber daya Kelautan dan Perikanan jika secara efektif akan meningkatkan akseptabilitas produk Perikanan Indonesia di pasar Internasional.

Dengan demikian Stasiun KIPM Bengkulu harus senantiasa meningkatkan akuntabilitas dan aksesptabilitas dengan menerapkan sistem jaminan mutu laboratorium pengujian SKIPM Bengkulu yaitu mengembangkan secara mandiri, profesional dan terakreditasi sesuai persyaratan teknis yang menerapkan internasional ISO 17025.2015.

Akreditasi laboratorium merupakan pengakuan resmi kemampuan laboratorium dalam melaksanakan pengujian dan pemeriksaan yang disertifikasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Untuk memperoleh hasil uji laboratorium yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, perlu adanya hubungan teknik dan metode yang telah divalidasi. Menyadari pentingnya teknik dan metode yang dalam pelaksanaan uji laboratorium, maka Stasiun KIPM Bengkulu secara bertahap mulai menyempurnakan teknik dan metode uji laboratorium melalui kegiatan validasi metode uji laboratorium dilaksanakan Uji profesiensi oleh Uji standar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSKIPM).

Untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan nasional Stasiun KIPM Bengkulu telah melaksanakan kegiatan pengembangan sistem informasi antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam mengaplikasikan sistem informasi online SISTERKAROLINE;
2. Publikasikan kegiatan pelayanan melalui instgram SKIPM Bengkulu.

Arah kebijakan dan strategi SKIPM BENGKULU tahun 2020 – 2024 untuk mewujudkan 6 (enam) tujuan SKIPM BENGKULU dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi SKIPM BENGKULU adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi, surveilen, audit, pengambilan contoh dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
4. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
5. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data.
6. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan maka Stasiun KIPM Bengkulu dipimpin oleh seorang Plt Kepala, dan dibantu oleh Kepala urusan tata usaha dan Kelompok jabatan fungsional.

Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap Jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dan pengawasan dan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu, penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium, penindakan pelanggaran, pengumpulan, pengolahan data dan informasi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Secara detail struktur organisasi SKIPM BENGKULU tahun 2024 terdapat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Bengkulu

BAB. IV INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA

4.1 Indikator Kinerja Program SKIPM BENGKULU Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (output). Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 -2024 dalam Struktur Manajemen Kinerja di SKIPM BENGKULU merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon IV, sebagaimana Lampiran 2.

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I, sebagaimana Lampiran II. Sasaran Strategis yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis SKIPM BENGKULU adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Target dan Sasaran Strategis serta Indikantor Kinerja Utama (IKU) SKIPM Bengkulu 2020-2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengendalian Mutu, terselenggaranya pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan	1	Jumlah Sertifikat CPIB Supplier yang diterbitkan	Sertifikat	-	-	5	5	3
		2	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik	Lokasi	1	1	1	1	1
		3	Ruang Lingkup Produk yang Dijamin Melalui Sertifikasi Sistem HACCP	Produk	2	2	1	1	1
		4	UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil	UPI	-	-	3	3	4

	Partisipatif		Perikanan						
2	Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan, Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara	5	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di UPT BPPMHKP Bengkulu	Nilai	-	-	84	84	84
		6	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance Sesuai Standar Sistem dan Regulasi Lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu	Lokasi	-	-	-	-	2
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP, Tatakelola Pemerintah yang Baik Lingkup BPPMHKP	7	Indeks Profesional ASN Lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu	Indeks	72	73	74	75	86
		8	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu	Nilai	81	85	85	85	82
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu	%	< 1	< 1	< 1	< 1	80
		10	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu	%	82	84	86	88	80
		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu	Nilai	88	88	88	90	93,76
		12	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT BPPMHKP Bengkulu	Nilai	-	86	81	81	82
		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup BPPMHKP Bengkulu	%	-	-	75	75	80
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP Bengkulu	%	-	-	75	75	80
		15	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Meraih predikat WBK Lingkup BPPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	-	-	-	-	75

4.2 Kerangka Pendanaan

Penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Selanjutnya sesuai dengan

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 bahwa Kerangka Pendanaan Program Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

Tabel 3. Kerangka Pendanaan Program Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu PerKegiatan Tahun Anggaran 2020 – 2024

No	Kegiatan	Anggaran (Juta)					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	4.834.849	4.834.849	4.834.849	4.834.849	2.811.165	22.150.561
2.	Pengendalian Mutu	228.795	228.795	228.795	228.795	135.500	1.050.680
3.	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	368.367	368.367	368.367	368.367	194.033	1.667.501
	Total	5.432.011	5.432.011	5.432.011	5.432.011	3.140.698	24.868.742

BAB. V PENUTUP

Revisi 2 Rencana Strategis (RENSTRA) SKIPM BENGKULU tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis SKIPM BENGKULU dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dalam mendukung agenda pembangunan nasional (NAWA CITA II).

Dokumen ini menjadi pedoman bagi SKIPM BENGKULU dalam mewujudkan pembangunan SKIPM BENGKULU selama tahun 2024. Dokumen ini juga menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan. Keberhasilan dalam mewujudkan dilaksanakan melalui 3 (tujuan) tujuan, yaitu: (1) Jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan meningkatkan nilai ekspor perikanan; (2) Meningkatnya layanan sertifikasi dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing; dan (3) meningkatnya pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan serta keamanan hayati ikan guna mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.